



SINERGI TNI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE OF 2019 (COVID-19) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Joni Kurnia, Deni D.A.R, T Triyoga Budi Prasetyo

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Munculnya virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) dari Wuhan Cina dalam waktu singkat menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini memberikan dampak di berbagai bidang termasuk pada bidang pertahanan negara. Covid-19 merupakan ancaman non militer yang dapat mengancam pertahanan Negara Indonesia. Sebab selain menyerang sektor kesehatan juga membuat ketahanan masyarakat menurun. Judul tesis ini adalah Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Ancaman Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau, dengan tujuan menganalisis Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah serta Faktor yang mempengaruhi sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi ancaman pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan informan ditentukan secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pandemi Covid-19 adalah ancaman nonmiliter yang berdimensi keselamatan umum. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 mengancam kehidupan masyarakat luas, terutama kesehatan. Sinergi, koordinasi, dan komunikasi antar stakeholder baik instansi pusat dan daerah merupakan salah satu cara yang digunakan dalam Menanggulangi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Covid-19 mengancam keselamatan bangsa dan negara. Pemerintah melakukan strategi pertahanan negara dengan mengeluarkan kebijakan berupa pedoman dan peraturan terkait penanganan Covid-19 serta melakukan pensinergian, kolaborasi, dan komunikasi antar stake holder dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Rekomendasi yang diajukan adalah agar TNI dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya lebih sinergi dalam menanggulunginya, disamping penetapan pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kata Kunci: Sinergi, TNI, Pemerintah Daerah, Covid-19, Provinsi Kepri.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi saat ini, dengan perubahan lingkungan strategis membuat dimensi ancaman semakin kompleks. Permasalahan ini tidak hanya bersifat local melainkan dalam lingkup yang lebih luas yaitu regional dan global. Kompleksitas ancaman ini tentunya dapat mengancam stabilitas keamanan serta pertahanan negara. Adapun dimensi saat ini, tidak hanya bersifat militer melainkan menysasar terhadap ke dalam bentuk nonmiliter. Aktor non negara (nonstate actor) dapat menjadi pelaku yang menimbulkan ancaman, selain itu munculnya ancaman hibrida (hybrid threat) sebagai bentuk campuran antara aktor negara dengan aktor non negara bekerja sehingga memerlukan persiapan pertahanan negara demi terwujudnya tujuan nasional.

Dilansir uma (2021) dalam batampos.co.id, Sekretaris Daerah TS Arif Fadilah melaporkan kasus Covid-19 semakin hari semakin meningkat dimana terdapat 3 zona orange Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Tinggal 4 Kabupaten/Kota yang zona kuning, tim vaksin terus bekerja dan sudah mencapai 7,6 persen 1.12.527 diatas angka nasional. Harus ada upaya terus menerus dan lebih tegas agar penyebaran Covid 19 bisa ditekan seminimal mungkin.

Satgas penanganan Covid 19 Provinsi Kepulauan Riau, mencatat bahwa terjadi lonjakan drastis pasien Covid 19 di Kota Tanjung pinang. Penambahan pasien Covid 19 di Tanjungpinang hampir tidak pernah melebihi 10 orang. Namun pada tanggal 3 April 2021, terjadi peningkatan pasien sebanyak 47 pasien sehingga jumlah total mencapai 1.591 pasien. Hal tersebut terjadi ketika tidak adanya alat yang membantu dalam pengumpulan serta pelacakan informasi terkait Covid19 (Republika, 2021).

Dari beberapa permasalahan dan kasus di Provinsi Kepulauan Riau tersebut, hal ini tentunya dibutuhkan peran dan sinergi dari seluruh stakeholder terkait untuk menanggulangnya, terutama Pemerintah Daerah dan TNI (militer), serta intelijen dalam menjalankan misi pelacakan untuk mengupayakan pencegahan dini dari serangan- Pandemi Covid-19 tersebut.

Selanjutnya, dengan melihat potensi ancaman asimetris yang ada, perlu adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan TNI untuk bersama-sama menghadapi ancaman asimetris (khususnya ancaman pandemi Covid-19) yang ada, terlebih berdasarkan geografis, Kepulauan Riau terdiri atas banyak pulau kecil, sehingga untuk menjalankan program pencegahan serangan asimetris/ancaman pandemi Covid-19 dibutuhkan peran dari banyak pihak yang terkait. Dengan adanya sinergi antar Pemerintah Daerah dan TNI, luasnya permasalahan ancaman asimetris/pandemi Covid-19 akan lebih mudah untuk dihadapi.

Peran TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara dari ancaman dan serangan dari luar tentunya sangat dibutuhkan terutama di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. TNI melalui Korem 033/WP dituntut untuk mampu menghadapi segala potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan wilayah NKRI di Provinsi Kepulauan Riau.

Dari ulasan latar belakang diatas, di dapatkan dua rumusan masalah yakni menganalisis bagaimana Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam upaya Menanggulangi pada ancaman Pandemi Covid-19? Dan Apa saja faktor yang mempengaruhi Sinergitas TNI dan Pemda dalam

Menanggulangi pandemi covid-19 di Kepulauan Riau?

Untuk menjawab kedua rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dalam mengupas rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Teori-teori yang dipilih tersebut juga menjadi penuntun dalam penelitian lapangan untuk mengurai serta menganalisis setiap informasi, data dan fakta yang didapat dilapangan dalam proses penelitian.

Sebagaimana disampaikan Najiyati (2011), bahwa sinergi adalah kombinasi dari unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. sehingga sinergi ini merupakan gabungan dari unsur-unsur yang bersinergi dan menjalin kerjasama untuk mencapai satu tujuan bersama dan mendapatkan keluaran yang lebih baik. Konsep sinergi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Komunikasi

Dalam Saluran formal, pola komunikasi organisasi ada tiga, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal:

- a. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara pihak yang lebih tinggi ke yang lebih rendah atau sebaliknya.
- b. Komunikasi horisontal adalah komunikasi memanjang, terjadi antara sesama anggota tim dalam divisi yang sama, atau peran lain yang memiliki tingkatan yang sama dengannya.
- c. Komunikasi diagonal dilakukan dengan memutus alur komunikasi yang ditentukan oleh organisasi, yang biasanya harus melewati prosedur dan tahapan tertentu.

Selanjutnya Saluran nonformal yang terjadi dalam organisasi adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa ada keresmian atau keformalan, Saluran komunikasi informal biasanya dilakukan pada jam-jam istirahat, atau waktu lain yang tidak membutuhkan keseriusan yang mendalam dalam membahas sesuatu keadaan organisasi secara gamblang, dan lain sebagainya.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang saling berhubungan secara teratur untuk dapat mempersiapkan waktu yang tepat dan jumlah yang sesuai sehingga dapat mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang harmonis dan seragam pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut Handoko (dalam Febrian, 2015) mendefenisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Jenis ancaman, berupa ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, pada umumnya merupakan ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan wabah penyakit; pelanggaran wilayah, perompakan dan pencurian sumber daya alam; siber dan spionase; peredaran narkotika; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka/perang konvensional (Peraturan Menteri Pertahanan RI, 2015).

Stephen M. Walt (1987) merumuskan teori keseimbangan ancaman atau balance of threat (BoT)

yang merupakan modifikasi dari teori keseimbangan kekuasaan atau *balance of power* (BoP) milik aliran neorealisme dalam hubungan internasional. Menurut teori ini, perilaku aliansi negara ditentukan oleh persepsi mereka terhadap ancaman dari negara lain (Walt, 1985). Dengan kata lain, perilaku setiap negara dipengaruhi oleh persepsi negara tersebut dalam melihat ancaman.

Dapat disimpulkan bahwa ancaman adalah suatu aktivitas yang dapat membahayakan kedaulatan suatu bangsa dan Negara. Saat ini dunia tengah dilanda wabah penyakit yang persebarannya sangat cepat, setiap Negara berlomba-lomba bagaimana menangkal wabah tersebut agar tidak menyebar cepat di dalam negaranya. Wabah penyakit termasuk ke dalam ancaman nonmiliter dan masuk pada ancaman nyata. Barry Buzan telah memetakan dalam studinya bahwa wabah adalah ancaman yang belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara. Menciptakan kekacauan dimana-mana serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat (Nainggolan, 2020).

Berdasarkan Undang Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

“Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, yang meliputi kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Sebagaimana diketahui bahwa, dalam dunia epidemiologi terdapat 3 tingkatan penyakit yaitu: endemik, epidemik dan pandemi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, mengartikan istilah ini sebagai berikut: endemik adalah penyakit menular yang tetap dalam suatu populasi dengan cakupan area tertentu, selanjutnya epidemi adalah peningkatan jumlah

kasus suatu penyakit, terjadi secara tiba-tiba di atas perkiraan biasa dan membatasi populasi di suatu wilayah sementara pandemi adalah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara /benua dengan penularan dalam jumlah yang masif (Tahrus, 2020). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pandemi berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi adalah kondisi atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada kedudukan tertentu dalam struktur masyarakat. Dampak pandemi tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga menyebabkan gangguan pada sistem perawatan kesehatan, kesehatan hewan, pertanian, pendidikan, transportasi, pariwisata dan sektor keuangan (Qiu et al, 2016-2017).

Sejak penyebaran pertama di Indonesia, Pemerintah menerbitkan kebijakan diantaranya melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 yang diperbarui melalui Keputusan Nomor 13A Tahun 2020, telah ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Tertentu Akibat Penyakit Virus Corona, Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, kemudian diperbarui dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, dengan pola pikir induktif dengan menunjukkan fakta permasalahan kasus yang ada dilapangan terlebih dahulu. Adapun penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018) adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis dan mengelola kejadian langsung di lapangan

dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif dirasa cocok untuk penelitian ini, karena peneliti berusaha untuk menemukan, menganalisa dan mengelola kejadian langsung yang ada dilapangan, terutama terkait Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi ancaman pandemi COVID-19 di Provinsi Kepri (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergi TNI dan Pemda dalam menanggulangi ancaman Pandemi COVID-19

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara TNI dan Pemda dalam menanggulangi ancaman pandemi Covid-19 menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan, kemampuan individu, kemampuan unit, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk alutsista, telah digunakan dan dikerahkan. dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan (Hanoatubun, 2020).

Hal ini sesuai dengan teori Graves (2008), sinergi didefinisikan sebagai interaksi dua atau lebih agen, sumber daya, atau aktivitas sedemikian rupa sehingga produk memiliki nilai lebih besar dari jumlah komponen, misalnya $1+1 > 2$. Graves membagi sinergi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Sinergi Organisasi, adalah sinergi yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi yang berbeda dengan menggunakan aset dan kemampuannya untuk saling membantu menciptakan sesuatu yang lebih baik.
- b. Sinergi Kebijakan, adalah sinergi yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi yang berbeda melalui kebijakan dengan mengartikulasikan posisi kebijakan dengan

menerapkan strategi yang efektif secara aktif.

- c. Sinergi Operasional, adalah sinergi yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi yang berbeda melalui operasi atau pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan tingkat kebijakan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat berjalan (Graves, 2008).

Sinergi yang telah dilakukan TNI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri dan jajaran terkait adalah melalui koordinasi mulai dari perumusan kebijakan hingga koordinasi pembagian tugas dalam menanggulangi ancaman pandemi Covid-19. Koordinasi Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelaraskan tujuan agar antar kementerian dan lembaga memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya setelah mendapatkan tujuan yang sama, merumuskan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi ancaman Pandemi Covid-19. fungsi dan kapabilitas lembaga tersebut. Kemudian kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi ancaman Pandemi Covid-19.

Instrument pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 salah satunya adalah sumber daya nasional. Sumber daya nasional Indonesia bisa dikatakan tidak ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kolonel Arm Yudhi Murfi, S.IP., M.Si yang menjabat sebagai Kasubdit Penyusunan Evaluasi Kebijakan dan Strategi Ditjakstrahan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, menyampaikan bahwa Ancaman COVID-19 telah merusak seluruh pertahanan negara kita, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan pendidikan juga terkena dampaknya. Hal ini menimbulkan

gejolak di masyarakat. Meski tidak mengkhawatirkan namun di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi hal-hal yang sangat signifikan. Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia yang mempengaruhi tercapainya tujuan negara.

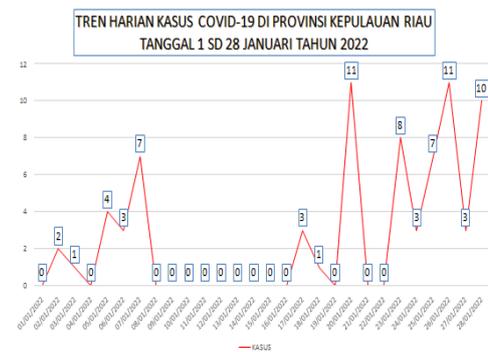
Pemerintah berupaya menerapkan berbagai strategi melalui kebijakan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Seluruh Kementerian dan Lembaga turut serta bersama-sama dalam Penanggulangan Covid-19 sesuai fungsinya. Salah satunya Kemhan dan TNI menjalankan kebijakan terkait percepatan, pendampingan, penanganan Covid-19 dan dampaknya. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kepri melalui Kepala Kesbangpol Kepulauan Riau, Lamidi (2021), menjelaskan, saat ini Pemda Kepri selalu melakukan koordinasi kemitraan dengan instansi lain untuk bersama-sama menghadapi setiap ancaman yang akan masuk ke wilayah Kepri. Sinergi Penanggulangan Ancaman Penyebaran Covid-19 antara TNI dan Pemerintah Daerah dilakukan dalam pembentukan Satgas Covid-19 Lintas Daerah yang beranggotakan TNI, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah. Dimana Satgas Covid-19 Lintas Daerah dipimpin oleh Danrem 033/WP sebagai ketuanya.

Selain itu, Pemprov Kepri melalui dinas kesehatan melakukan upaya peningkatan proses 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang menjadi kunci dalam pengendalian kasus pandemi Covid-19. Dalam Proses Pengujian/Testing, Pemprov Kepri membentuk jaringan laboratorium pemeriksaan dan percepatan tes Covid 19 bagi yang memiliki gejala (tersangka). Sedangkan dalam proses tracing, strategi yang diterapkan adalah memperkuat penyelidikan epidemiologi dan contact tracing serta pemantauan kontak dekat. Selanjutnya dalam proses Perawatan/Treatment yaitu melalui

penyiapan Rumah Sakit Darurat, Rumah Sakit Perawatan dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19.

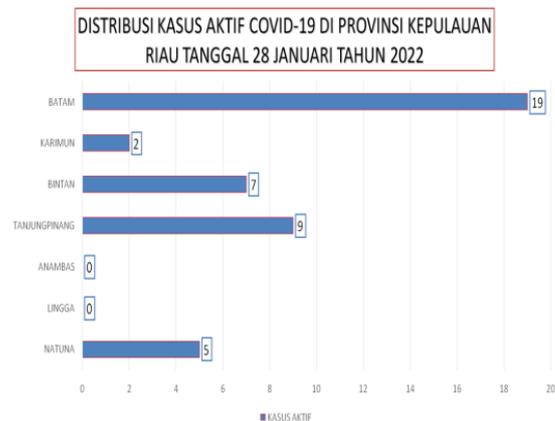
Data Perkembangan Kasus Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau 2022, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1. Tren Harian Kasus Covid-19



Sumber: Covid.co.id, 2022

Gambar 2. Distribusi Kasus Aktif Covid-19



Sumber: Covid.co.id, 2022

Jumlah Kasus Konfirmasi Kemungkinan Omicron (Probable Omicron) di Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 29 Januari 2022 Sebanyak 8 Kasus dengan rincian sebagai berikut: Warga Batam 4 orang, WNA Singapura 1 orang, PMI Asal Malaysia 1 orang, 2 orang Luar Daerah (Pendatang). Dari 8 Kasus ditemukan 6 kasus dengan riwayat perjalanan (1 Kasus dengan riwayat kontak erat), 1 Kasus tanpa riwayat perjalanan dan riwayat kontak tidak diketahui, 1 Kasus Hasil Surveilans Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

Upaya Penanggulangan yang dilakukan Dinas Kesehatan Pemrov. Kepri, adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan Isolasi Terpadu pada semua Kasus Konfirmasi
- b. Tracing pada Kontak Erat semua Kasus Konfirmasi
- c. Pengambilan Sampel Entry Tes dan Exit Tes pada Semua Kontak Erat
- d. Karantina Kontak Erat yang dipantau oleh Puskesmas setempat
- e. Rekomendasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Untuk Menutup Sementara Kegiatan Belajar Tatap Muka Di SMA 23 Batu Aji
- f. Notifikasi kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap 1 Kasus Probable Omicron yang berada di Pekanbaru

Peran RSKI di Pulau Galang sangat membantu peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dimana RSKI yang merupakan proyek pemerintah pusat menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Pembangunan RSKI merupakan langkah tepat yang diambil oleh Pemerintah Indonesia mengingat peran dan fungsi keberadaan RSKI sangat efektif dan efisien. RSKI memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 yang berasal dari luar negeri. Karena RSKI fokus mengkarantina Tenaga Kerja Indonesia (PMI) yang baru pulang dari negara lain di masa pandemi ini, sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.

Faktor yang mempengaruhi Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam upaya cegah dini pada ancaman Pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau.

Sinergi secara umum adalah kerjasama yang ditunjukkan melalui kegiatan bersama, hubungan atau

operasi untuk dapat mencapai satu tujuan yang ingin dicapai. faktor yang mempengaruhi Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi ancaman Pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau dapat muncul baik itu sifatnya dari luar(external) maupun dari dalam (internal):

1. Faktor External.

Ancaman non-militer adalah ancaman yang harus diwaspadai, karena kekuatan destruktif dari ancaman non-militer ini lebih kuat, lebih mudah diterapkan, dan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Upaya membangun pertahanan negara yang kuat telah diatur melalui berbagai regulasi. Namun, perkembangan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter tidak jelas dan tidak bersinergi dengan baik. Jika kondisi ini terus berlanjut dapat menyebabkan pertahanan negara dari sisi nirmiliter menjadi lemah dan tidak akan mampu mengatasi ancaman nirmiliter dari negara lain (DKP, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubdit Evaluasi Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Renstra Kementerian Pertahanan yang saat ini dijabat oleh Kolonel Arm Yudhi Murfi, S.IP., M.Si . kemudian Kolonel Inf. Enoch Solehudin, S.E. (2021), sebagai Kepala Staf Korem 033/WP, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan dan Karumkit RSKI P.Galang. Covid-19 adalah ancaman di bidang kesehatan, Virus Corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang ditimbulkannya tidak diketahui sebelum mewabah di Wuhan, China, pada Desember 2019 (WHO, 2021). Hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan penyebaran virus Corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (WHO, 2020).

Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani, dan Andhini Citra Pertiwi (2020) dengan judul "Peranan Lembaga Pertahanan Dalam Hadapi Pandemi Covid-19" (Sari dkk., 2020). Kajian ini berfokus pada peran dua institusi pertahanan, yakni Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menangani Covid-19.

Lamidi (2021) kemudian menjelaskan permasalahan posisi geografis, dimana Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan kapasitas perairan 96% dan luas daratan 4% sehingga sumber permasalahan utama adalah sarana transportasi sebagai akses antar wilayah, berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja sehingga Kepri menjadi pintu utama penyebaran pandemi Covid-19 karena mayoritas PMI yang pulang berasal dari Malaysia dan Singapura.

Mohamad Hasbi selaku Kepala BPBD Kepri (2021) menjelaskan bahwa penyebaran ancaman Pandemi Covid19 di Prov. Kepri, tergantung kegiatan masyarakat di Kabupaten/Kota, pembukaan pelabuhan sebagai pintu masuk, pelabuhan tikus yang bisa menjadi jalur gelap bagi orang untuk masuk. Dalam suatu wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk medis dan non medis.

Selain itu dengan kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), ancaman Covid19 berpotensi meningkat sebagaimana disampaikan oleh satgassus Covid19, total akumulasi eksodus PMI akibat pandemi Covid-19 dari Malaysia dan Singapura melalui Provinsi Kepulauan Riau sejak 17 Maret 2020 hingga 24 April 2021 adalah sebesar tercatat sebanyak 79.140 orang. Angka ini akan bertambah dengan rencana pemulangan 5.226 PMI yang dideportasi dari Malaysia, selain pemulangan PMI yang kontraknya telah habis mencapai 49.682 orang. Kepulangan ini berpotensi membawa virus baru Covid-19 ke

Indonesia. Dimana hal ini terlihat dari pernyataan Bisri (2021), selaku Kepala Dinas Kesehatan Kepri yang menjelaskan bahwa beberapa orang dari PMI terbukti membawa virus Covid-19, dan ada pula yang memiliki varian Covid-19 baru yaitu virus (B 1525).

Keberadaan RSKI Pulau Galang masih memiliki beberapa kendala di lapangan, saat ini Pemerintah Daerah Kepulauan Riau sedang membantu anggaran pengelolaan RSKI, dimana hal ini ditunjukkan dengan pemberian dana hibah yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan operasional di RSKI. Dana hibah telah ditinjau dari semua aspek, termasuk kemungkinan bantuan ganda yang sama dari pemerintah pusat. Sebagai rumah sakit khusus yang berada di wilayah Kepri, Pemprov Kepri merasa ikut bertanggung jawab menjaga dan memperhatikan keberadaan RSKI. Penyerahan hibah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membantu dan mendukung keberadaan RSKI di wilayahnya.

2. Faktor Internal.

Semenjak Covid-19 muncul pertama kali hingga saat ini telah menimbulkan banyak dampak terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya dari sektor kesehatan, namun juga ekonomi, sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kolonel Arm Yudhi Murfi, S.IP., M.Si yang menjabat sebagai Kasubdit Penyusunan Evaluasi Kebijakan dan Strategi Ditjakstrahan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Kita ketahui bahwa semua negara di dunia ini kena dampak sejak Covi-19 muncul. Ekonomi dunia berdampak, bahkan ada yang ekonomi minus. Jadi mulai dari negara maju, negara berkembang, atau negara yang masih terbelakang sudah jelas terkena dampaknya, apalagi bidang sosial.

Pandemi Covid-19 melahirkan krisis dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks global, termasuk bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, bahkan diperparah dengan nuansa politisasi pandemi, pengabaian ilmu pengetahuan tentang covid-19 di awal krisis, kapasitas terbatas. ekonomi, dan sistem perawatan kesehatan yang buruk. Penanganan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan penanganan yang cenderung terfragmentasi, baik di tingkat global maupun internal di masing-masing negara. Masing-masing lingkup kewenangan (negara bagian, bangsa atau pemerintah daerah) cenderung mengambil kebijakan untuk menjamin keamanannya sendiri, dan seringkali tidak sinergis atau terkait dengan yang lain.

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa, inovasi kebijakan Pemerintah Daerah penting dalam penanganan pandemi Covid-19 (Dian Kus Pratiwi, 2021), Inovasi kebijakan pemerintah daerah menjadi penting dalam penanganan pandemi Covid-19, hal ini menunjukkan bahwa, Urgensi Inovasi Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 dalam konteks negara kesatuan, terdapat keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam kewenangan, keuangan, dan hubungan pengawasan. . Selanjutnya bentuk inovasi kebijakan Pemerintah Daerah, Inovasi penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kepentingan nasional untuk melaksanakan tujuan negara berpedoman pada asas: Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang setinggi-tingginya (*solus populi suprema lex*).

Koordinasi kemitraan dengan Pemerinta Daerah, ataupun instansi dan lembaga lain untuk menanggulangi ancaman Pandemi Covid-19 yang akan terjadi. Koordinasi bukan berarti dapat dengan cepat dilakukan pada masa pandemi, karena pemahaman dan

penguasaan teknologi yang ada belum merata. Demikian juga pada kegiatan komunikasi secara menyeluruh kepada semua elemen yang ada di Korem 033/WP terkait potensi ancaman yang mungkin masuk ke dalam wilayah Kepulauan Riau, dengan adanya komunikasi menyeluruh ini dapat meningkatkan pemantauan dari potensi ancaman yang akan masuk terkadang muncul kesulitan dalam mewujudkan sinegri yang dilakukan untuk melakukan menghadapi ancaman non-militer berupa penyebaran Covid-19 dalam hal pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.

Kendala yang dihadapi dalam Menanggulangi ancaman pandemi Covid-19, apabila masyarakat tidak mengikuti himbuan pemerintah yang ditetapkan serta adanya penerimaan informasi yang tidak benar di media massa dan online, serta pengetahuan masyarakat dan kedisiplinan yang kurang terhadap protokol kesehatan, Sulitnya jika masyarakat tidak ikut aturan dari pemerintah, adanya antipati terhadap pemerintah sehingga diperlukan pendekatan yang humanis kepada masyarakat apalagi dampak covid-19 telah mengganggu kebebasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau membuat Kebijakan terkait upaya pengendalian terhadap pandemi Covid-19 yang di sesuaikan dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam upaya menekan angka penyebaran pandemi Covid19 ini Pemprov. Kepri melakukan berbagai upaya preventif dengan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan aktifitas masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan belajar di rumah bagi anak sekolah termasuk pengawasan agar anak tidak beraktifitas di luar rumah. Berdasarkan data yang didapat, diketahui bahwa Ancaman pandemi Covid-19 saat ini

menjadi ancaman non-militer nyata yang sedang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Koordinasi kemitraan dengan Pemerintah Daerah, atau instansi dan lembaga lain untuk menanggulangi ancaman Pandemi Covid-19 yang akan datang. Koordinasi bukan berarti bisa dilakukan dengan cepat di masa pandemi, karena pemahaman dan penguasaan teknologi yang ada belum merata. Demikian pula kegiatan komunikasi secara menyeluruh kepada seluruh elemen di Korem 033/WP mengenai potensi ancaman yang mungkin masuk ke wilayah Kepri, dengan komunikasi yang komprehensif ini dapat meningkatkan pemantauan terhadap potensi ancaman yang akan masuk terkadang muncul kesulitan dalam mewujudkan sinergi yang baik. Hal itu dilakukan untuk menghadapi ancaman nirmiliter berupa penyebaran Covid-19 dalam hal pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.

Kendala yang dihadapi dalam mengatasi ancaman pandemi Covid-19, jika masyarakat tidak mengikuti himbuan yang telah ditetapkan pemerintah dan diterimanya informasi yang tidak benar di media massa dan online, serta pengetahuan masyarakat dan kurangnya disiplin terhadap protokol kesehatan. pemerintah, ada antipati terhadap pemerintah sehingga diperlukan pendekatan yang manusiawi kepada masyarakat, apalagi dampak covid-19 telah mengganggu kebebasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah membuat kebijakan terkait upaya menanggulangi pandemi Covid19 yang disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai cara untuk menanggulangi pandemi Covid19, Pemprov Kepri telah melakukan berbagai upaya preventif

dengan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan belajar di rumah bagi anak sekolah, termasuk pengawasan agar anak tidak melakukan kegiatan di luar rumah.

Keberadaan RSKI yang terletak di kecamatan Sijantung dan berjarak kurang lebih 63 km dari pelabuhan Batu Ampar dan kurang lebih 63 km dari bandara Nadiem Batam. Banyak yang menganggap pembangunan RS Khusus Infeksi Covid-19 itu mubazir, dinilai tidak efektif karena jaraknya yang begitu jauh dan dibangun di lokasi yang terpencil sehingga sangat sulit akses masyarakat untuk mencapai lokasi.

Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang masih memiliki beberapa kendala di lapangan, seperti masalah infrastruktur yang juga menjadi kendala dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau seperti kurangnya ruang perawatan sehingga perlu ditambah, karena jika terjadi lonjakan pasien positif maka RSKI tidak bisa menampung pasien karena keterbatasan tempat. Masih terdapat 17 titik kelurahan dan 131 kelurahan yang belum bisa menerima sinyal dan informasi (HP) menjadi kendala yang harus segera diselesaikan.

Masalah SDM adalah kurangnya tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Tenaga medis di ICU yang belum terpenuhi menyebabkan ruang ICU tidak dapat beroperasi sebagaimana fungsinya. Minimnya tenaga medis yang tersedia membuat penanganan kasus Covid-19 tidak maksimal. (Nasution, 2021).

Sinergi yang dibangun TNI dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dalam menanggulangi ancaman Pandemi Covid-19 tetap memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi yang harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan satu sama lain, antara lain:

- a. Perlu ada peningkatan intensitas dan penguatan

terkait sosialisasi protokol kesehatan di masyarakat, mengingat saat ini Kepri sedang mengalami peningkatan jumlah positif Covid-19;

- b. Koordinasi lintas sektoral perlu dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah Kepri, terutama dalam penanganan isolasi kasus terkonfirmasi dan karantina kontak erat. Sehingga RSKI memaksimalkan fasilitasnya;
- c. Perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah Kepri dengan RSKI terkait teknis penanganan Covid-19 di lapangan dan dicarikan solusi bersama terkait kendala yang dihadapi dalam penanganan Covid-19, yaitu kurangnya ketersediaan sarpras, dokter spesialis dan tenaga medis di ICU sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengoperasian ruang ICU. Selain itu masih adanya kerusakan beberapa peralatan laboratorium PCR, terbatasnya tempat isolasi terpadu yang juga menjadi kendala bagi RSKI dan rumah sakit di kepulauan Riau, karena saat ini RSKI masih kekurangan ruang perawatan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk penyelesaian masalah ini; dan
- d. Perlu peningkatan intensitas rapat koordinasi antara Pemda Kepri, Satgas Covid-19 di perbatasan dan RSKI terkait rencana pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (PMI) melalui pintu masuk di Batam. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk

antisipasi terhadap potensi penyebaran virus Covid-19, bagaimana tentang kesiapan mekanisme dan rencana teknis pemulangan serta anggaran dan fasilitas pendukung lainnya seperti tempat karantina, peralatan Antigen, Swab dan PCR agar rencana tersebut dapat terlaksana secara optimal.

SIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian “Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Ancaman Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinergi TNI dan Pemda dalam Menanggulangi pandemi Covid-19.

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dalam Penanggulangan ancaman Covid-19 sudah dibangun dari semenjak adanya pandemi Covid-19. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 yang bertujuan untuk dapat mengatasi pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia dengan membangun fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan Covid-19 atau penyakit infeksi emerging yang di bangun di Pulau Galang Batam Provinsi Kepulauan Riau, mendapat dukungan dari Pemda Kepri. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen dari Pemda Kepri terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan TNI bekerja sama untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan di masyarakat dan melakukan pengawasan di beberapa lokasi yang rawan akan penyebaran Covid-19 di wilayah kepulauan riau, peningkatan proses 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang merupakan kunci dalam

pengendalian kasus pandemic Covid-19. TNI juga terlibat dalam pengawasan di wilayah perbatasan dan pintu keluar masuk ke wilayah Kepulauan Riau sebagai bentuk penanggulangan ancaman Pandemi Covid-19. Pemda Kepri juga melibatkan TNI dalam operasi disiplin protokol kesehatan sampai ke tingkatan RT/RW. Selain itu Pemda Kepri dan pihak RSKI terus melakukan koordinasi dan komunikasi terkait perkembangan kasus covid-19 yang terjadi di Kepulauan Riau. Komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara Pemda Kepri dan pihak RSKI ini bertujuan untuk dapat memastikan kesiapan dalam penanganan kasus covid-19 di wilayah kepri mengingat adanya upaya pemulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) dan warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri. Kesiapan tersebut mencakup fasilitas ruang karantina, logistik kesehatan, dan kebutuhan lainnya agar terjalannya suatu kerjasama dalam persiapannya. Penunjukan Danrem 033/Wirapratama sebagai kasatgassus Covid-19 di perbatasan oleh Gubernur Kepri semakin menguatkan bahwa Sinergi TNI dan Pemda kepri telah berjalan dengan baik, sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi antara TNI, Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dan pihak pengelola RSKI dalam menangani dan menanggulangi ancaman Covid-19.

2. Faktor yang mempengaruhi

Sinergi TNI dan Pemda dalam Menanggulangi ancaman pandemi covid19 di Prov. Kepri.

- a. Sampai saat ini ancaman yang harus ditangani di Provinsi Kepulauan Riau adalah ancaman pandemi Covid-19, hal ini diperparah karena datangnya Pekerja Migran Indonesia dari negara tetangga yang membawa virus Covid-19. Adapun

sinergi yang dibangun antara TNI dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau untuk Menanggulangi ancaman pandemi Covid-19 tersebut adalah dengan: 1) Melakukan koordinasi dan komunikasi melalui rapat formal; 2) Membentuk Satgas khusus penanganan ancaman asimetris yang ada; 3) Melakukan pemantauan dan fungsi intelijen untuk mendapatkan, serta mengkomunikasikan informasi terkait ancaman yang datang; 4) Melakukan koordinasi secara daring ataupun luring dengan instansi lain; 5) Membentuk program dan strategi pencegahan dan penanganan ancaman asimetris secara bersama-sama; dan 6) Melakukan sosialisasi bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

- b. Dalam rangka menanggulangi ancaman Pandemi Covid19 yang terjadi di Prov. Kepri, dibutuhkan peran dan sinergi dari seluruh stakeholder terkait penanggulangan, terutama TNI dan Pemerintah Daerah. Peran Tentara Nasional Indonesia (Korem 033/WP) sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara dari ancaman dan serangan luar tentu sangat dibutuhkan.
- c. Peningkatan kasus Covid19 di Prov. Kepri masih terjadi hingga saat ini dan terus memakan korban jiwa bagi masyarakat. Berbagai strategi dan kebijakan pemerintah Kepri seperti sosialisasi

proses secara masif kepada masyarakat melalui media elektronik, pembatasan waktu-waktu tertentu, pembentukan Satgas-Satgas kecil dan melakukan Rapid Test serta Swab Antigen Test, peningkatan proses 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang merupakan kunci dalam pengendalian kasus pandemic Covid-19. namun lonjakan dan peningkatan jumlah pasien positif masih terus terjadi.

Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi dan saran kepada pemerintah, masyarakat dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

Saran Teoritis:

- a. Setelah adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan Sinergi, Pertahanan, Ancaman, dan Pandemi Covid19. Khususnya mengenai ancaman pandemi Covid19 di Prov.Kepri.
- b. Terdapat penelitian yang mampu mengkaji mengenai Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Ancaman Covid19 di Prov.Kepri.
- c. Kepada Universitas Pertahanan RI sebagai kampus Bela Negara agar bisa membuat suatu kajian, mata kuliah dan penelitian mengenai Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah terutama mengenai pandemi Covid-19.

Saran Praktis:

- a. Perlu adanya peningkatan proses 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang merupakan kunci dalam pengendalian kasus pandemic Covid-19. mengingat saat ini Kepulauan Riau mengalami peningkatan angka positif Covid-19;
- b. Perlu koordinasi lintas sektor oleh pemda Kepri khususnya terkait penanganan isolasi kasus konfirmasi dan karantina kontak erat. Hal tersebut dapat dikomunikasikan dan di koordinasikan dengan pihak RSKI untuk memaksimalkan fasilitas yang dimilikinya;
- c. Perlu ditingkatkannya koordinasi dan komunikasi antara Pemda Kepri dan RSKI terkait teknis penanganan covid-19 di lapangan dan mencari solusi secara bersama sama, karena masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penanganan covid-19, yaitu masih minimnya tenaga dokter spesialis dan tenaga medis di ICU sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pengoprasian ruangan ICU di RSKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. (2018). "Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna". *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)*.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chamidi, Safrudin. (2004). "Kaitan antara Data dan Informasi Pendidikan dengan Perencanaan Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 10 (48), hh. 311—328.

- Chandarana, Parth dan Vijayalaksmi, M. (2014). "Big Data Analytics Frameworks". *International Conference on Circuits, Systems, Communication and Information Technology Applications (CSCITA)*.
- Eppler, Erhan. (2009). "The Return of The State". London: *Forumpress*.
- Gunaratma, Rohan (2015). "The Rise of the Islamic State: Terrorism's New Face In Asia". *Panorama*. hh. 9-20.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- Kertopati, Susaningtyas N.H. (2013). *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Krietner et al. (2005). *Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, Y., Akim, dan Sari, D. S. (2016). "Power Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Irak and Suriah, ISIS)". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. 1 (1). Universitas Padjajaran.
- Nainggolan, P. P. (2014). "Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua". *Jurnal Kajian*. Vol. 19 (3).
- Nuryaman dan Veronica, C. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori Dan Praktik*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pendit, Putu Laxman. (1992). *Makna Informasi: Lanjutan dari Sebuah Perdebatan, dalam Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangan*. Jakarta: Kesaint-Blanc.
- Prabowo, D. (2015). "Mantan Wakil Kepala BIN Sebut ISIS Punya Jaringan Baru di Indonesia." Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/22/14022091/Mantan.Wakil.Kepala.BIN.Sebut.ISI.S.Punya.Jaringan.Baru.di.Indonesia>, diakses pada 25 Agustus 2021.
- Riasetiawan, Mardhani. (2016). *Pusat Data untuk Pemerintahan*. Yogyakarta: Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, F MIPA UGM
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT.Indeks Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Susanto, Azhar. (2002). *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi 2. Bandung: Lingga Jaya.
- Tidwell, A. C. (1998). *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York: Continuum.
- Tippe, Syarifudin. (2016). *Ilmu pertahanan : sejarah, konsep, teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika.